



PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KACAMATA ICT

*Moh. Roqib *)*

**) Penulis adalah mantan Ketua Unit Studi Gender (USG), dan dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto. Sekarang dia sedang menunggu ujian disertasi Program Doktor (S-3) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Abstract: *This paper will discuss woman's politic role, political leadership viewed as difficult task, and woman deemed as incapable. At this point, ICT or multimedia can effectively help woman's political task. Sophisticated and enhanced information technology and communication can simplify leader task and duty. Through ICT, leader can give commando, dividing task, motivate, and giving punishment quickly and easily. ITC make everything easy, fast, with high quality. Computerization and digitalization positioned woman equal with man, as long as knowledge and technological capability equal too. Physical constraint is not a problem for one that technology-literate. The last question is about quality, only depend on it man and woman have equal chance to success and leading the world.*
Keywords: ICT, woman political role, leadership.

A. PENDAHULUAN

Kenyataan pada saat ini, bisa jadi merupakan impian pada masa lalu. Orang bisa berbicara dan melihat kawan bicaranya dari jarak ribuan kilometer. Jika hal ini dinalar pada masa Majapahit, perilaku ini adalah mustahil, dan yang melakukannya dianggap “kejinen”, kemasukan jin alias gila. Membuat KTP atau KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hanya 10 menit; membayar SPP dan melihat nilai untuk mahasiswa tidak perlu ke kampus; bimbingan dan pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan; Hal-hal tersebut dulu mustahil untuk dikatakan, meskipun saat ini yang menanyakannya dianggap “orang yang dilahirkan terlambat”, seharusnya sudah lahir pada jaman bahola, jaman Mataram kuno. Saat ini, semua bisa cepat dengan kualitas prima seperti permainan sulap yang hanya dengan “abagedabra”. Uang yang diinginkan segera diproses lewat mesin ATM, dan “jreng” uang pun keluar.

Inilah keajaiban masa lalu dan kenyataan saat ini. Meskipun saat ini masih ada pejabat, pimpinan perusahaan, pimpinan, dan aktivis politik yang berwatak dan berkualitas masa lalu, gagap teknologi sementara dirinya berdampingan dengan multimedia. Multimedia masih asing bagi dirinya dan belum mampu menggunakan atau memanfaatkannya.

Kecanggihan di atas terjadi berkat kemajuan *Information and Communication Tecnologi* (ICT), sebuah teknik atau cara untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menggunakan, menganalisa, menyebarkan, dan menyajikan informasi dan komunikasi. Teknik atau cara seperti ini berada pada disiplin ilmu elektronika, komputasi, dan pemrograman. Wujud nyata dari teknologi ini adalah komputer beserta peralatan pendukungnya, seperti seperangkat komputer, telepon, internet, piranti perangkat lunak, dan lainnya. Pada perkembangan terakhir, peralatan sistem telekomunikasi yang semula terpisah dari kelompok komputer saat ini telah berkonvergensi membentuk jaringan komunikasi data serta aplikasi multimedia.¹ Dalam konteks multimedia ini, ICT ini diperbincangkan.

Kemajuan ini dirasakan dan dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membantu kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil kerjanya. ICT hanya dirasakan oleh mereka yang berpendidikan cukup dan berpengalaman. Bagaimana dengan masyarakat pedesaan yang miskin, berpendidikan



rendah, dan jauh dari jangkauan jaringan telepon atau sinyal telepon genggam. Berbicara tentang kelemahan ini, yang paling “mringing” adalah kaum perempuan yang oleh masyarakat patriarki diposisikan sebagai jenis makhluk kedua dan mendapatkan giliran paling akhir jika ada jatah memperoleh “kenikmatan”, mendapatkan tugas pertama dalam mendidik anak dan generasi bangsa, dan menjadi pilihan darurat dalam pemilihan pemimpin, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam konteks politik, bagaimana kecanggihan ICT tadi berkolaborasi dengan kepentingan politik perempuan yang sebagian masih dimarjinalkan dalam lingkup sosial secara umum. Di kantor, sekolah, kampus, dan dunia pemerintahan dirasa sudah banyak kemajuan tentang keadilan dan kesetaraan, tetapi di wilayah publik yang lebih luas, mereka masih mencicipi yang serba singkat. Bisakah ICT ini menjadi media perpolitik yang efektif bagi perempuan Indonesia, sebagaimana multimedia ini dimanfaatkan secara efektif di Amerika.²

Tulisan ini hendak membincang peran politik perempuan dengan fokus tugas kepemimpinan secara umum. Terkait dengan tugas berat kepemimpinan (politik), perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan. Untuk itu, semua kalangan meyakini ada “makhluk ajaib” yang bernama ICT atau multimedia tadi, yang bisa membantu cukup efektif bagi kerja-kerja politik perempuan. Lalu apalagi yang dipersoalkan. Pada tulisan ini, sisi penting yang tidak perbincangkan adalah dasar teologis-keagamaan tentang dalil-dalil teks kitab sucinya. Penulis hanya akan mengungkap realitas tugas, kewajiban secara global, dan bagaimana ICT membantunya sehingga ada keterkaitan logis antara keduanya. Di panggung politik, secara riil ditemukan dalam sejarah ada Ratu Bilqis pada jaman Nabi Sulaiman;³ Ratu Shima di Jawa Tengah yang makmur; Aisyah yang memimpin perang Jamal melawan Khalifah Ali Ibn Abi Thalib; Ratu Elisabeth; Presiden Benazir Butto, dan presiden Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; dan sederetan pemimpin perempuan lain.

Secara faktual, data historis ini tidak mungkin diingkari. Karenanya, perbincangan dari aspek dalil dan legalitas teologis sudah jelas, meskipun masih menyisakan perdebatan. Tulisan ini hendak mengkaji problem dan dilema perempuan yang secara sosiologis dinyatakan sebagai manusia kedua di bawah laki-laki⁴ dengan menggunakan kaca mata ICT. Tulisan ini diharapkan akan memperjelas posisi politik perempuan dan meminimalkan kegamangan sebagian orang terhadap kepemimpinan perempuan. Meskipun demikian, sejak awal harus diingatkan bahwa kualitas tetap menjadi kata kunci, bukan karena perempuan bisa menjadi pemimpin kemudian menurunkan kualitas kepemimpinan tersebut.

B. KEKALAHAN POLITIK PEREMPUAN

Kakalahan terkadang meluruhkan keyakinan yang tertanam dalam diri seseorang. Untuk mengembalikan keyakinan tersebut membutuhkan waktu dan bukti yang mampu meneguhkan kembali keyakinan yang hilang, *affirmative action*. Sebagai contoh, peran perempuan dalam masyarakat patriarkhis jika dilepas tanpa kebijakan yang mengukuhkan bahwa demi keadilan harus ada keberpihakan kepada yang lemah dan dilemahkan. UU Pemilu yang disepakati DPR pada 3 Maret 2008 memuat sejumlah materi baru, di antaranya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR/DPRD. Setiap 3 nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 calon perempuan.⁵ Penentuan kuota seperti ini menunjukkan fakta kekalahan politik perempuan dalam pentas perpolitikan di negeri ini karena kekuatan mereka harus ditopang oleh undang-undang dan jika dibebaskan diyakini tidak akan mendapatkan posisi dan peran itu. Sebagai langkah awal dan *affirmative action*-nya, hal ini bisa diterima meskipun harus cepat-cepat diprogram untuk dihilangkan jika kesadaran pada keadilan dan kualitas sudah menjadi



standar dalam pemilihan calon legislatif. Yang terpenting untuk dilakukan adalah pemberdayaan perempuan di segala bidang secara integral dan komprehensif.

Contoh pemilu Bupati Banyumas yang menampilkan empat pasang calon, di antaranya pasangan calon yang wakil bupatinya adalah perempuan, pasangan calon Singgih Wiranto – Laely Sofiah Manshur. Laely sebagai ketua Muslimat NU maju sebagai calon Bupati karena ada tawaran dari beberapa calon Bupati yang kesemuanya adalah laki-laki. Dalam internal NU, sejak awal muncul pro dan kontra tentang legalitas (menurut agama) perempuan maju menjadi pemimpin politik kabupaten. Yang setuju karena perbincangan tentang pemimpin perempuan dalam NU itu sudah tuntas saat Munas Alim Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa tahun yang lalu. Jika saat ini diungkit, diyakini karena tendensi politik dari orang tertentu yang tidak mengharapkan Laely maju dan jadi wakil bupati. Yang kontra menggunakan dasar klasik tentang keabsahan pemimpin politik atau negara perempuan dengan menyatakan ayat “*Arrijalu Qawwamuna ‘alannisa*”, “laki-laki adalah pemimpin perempuan”, dan Hadis yang menyatakan bahwa “kaum yang dipimpin perempuan tidak akan sejahtera.”⁶ Pada pertemuan 50 kiai yang diprakarsai oleh Tim Siyasa NU,⁷ pendapat pro-kontra ini bisa diselesaikan, dan Laely Manshur bisa dipahami untuk maju, meskipun belum mendapatkan dukungan riil dari para kiai NU.⁸ Reaksi terhadap Laely tersebut menunjukkan bahwa di NU sendiri kepemimpinan perempuan belum dipahami secara baik oleh kiai-kiai di beberapa daerah,⁹ dan pasangan calon tersebut belum mampu memberikan informasi yang mampu meyakinkan para ulama yang berseberangan.

Berbeda dengan kabupaten tetangga, Kebumen yang pasangan perempuan, Bupati Rustriningsih mampu memimpin sampai dua kali dengan menggandeng ulama NU dan didukung oleh mayoritas ulamanya. Dukungan ulama yang lemah, pemanfaatan ITC, dan media massa terutama cetak yang tidak dikelola dengan baik, serta jaringan yang kurang solid, pasangan calon Bupati Singgih Wiranto dan Laely Mansyur mengalami kekalahan dan menduduki urutan ketiga, setelah pasangan Bambang Priyono-Tossy Ariyanto.¹⁰ Ia kalah dari pasangan lain yang memanfaatkan ICT, jaringan, dan “kekuatan lain”. Kekalahan ini memperkuat pandangan sebagian orang bahwa agama belum bisa menerima pemimpin perempuan.

Secara nasional, kehadiran perempuan dalam kancah politik belum menggembirakan. Sebagai contoh, hanya beberapa nama yang menjabat sebagai menteri, satu orang gubernur Propinsi Banten, tiga bupati di Jawa Tengah. Keinginan kuota 30% masih jauh dari kenyataan, jika 30% untuk anggota legislatif tidak diikuti oleh kualitas perempuan yang memadai dan mampu bersanding sejajar dengan politisi laki-laki, maka ini adalah kekalahan berikutnya yang diderita perempuan.

C. MEMBACA HAKIKAT KEPEMIMPINAN

Al-Qur'an mengajar membaca sejak awal. Kepemimpinan (termasuk di bidang politik) harus dibaca dengan adil, jika aspek jenis kelamin tidak dibutuhkan, maka menjadi tidak adil jika mempersyaratkannya. Tambahan yang tidak dibutuhkan seringkali bertendensi, yang dikemas dalam kalimat undang-undang atau aturan.

Kepemimpinan, *imamah*, *imarah*, *ziamah*, *khilafah*, atau *leadership* memiliki arti aktivitas (seni) seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau ditetapkan. Kepemimpinan mengandung maksud suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain menuju pencapaian harapan dan cita-cita.¹¹ Dalam kepemimpinan ada unsur kemampuan dan aktivitas mempengaruhi, mengajak, meng-



arahkan, menciptakan, meyakinkan, saling mempengaruhi antarpribadi, bekerjasama, hubungan dan pemeliharaan struktur, hubungan kekuasaan, seni mengkoordinasi dan memotivasi, aktivitas yang memudahkan kelompok, membuat orang lain mengerjakan sesuatu, menggunakan wewenang, dan mengambil keputusan.

Kepemimpinan yang positif akan bergerak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama¹² dan dilakukan dengan bekerjasama. Berbeda dengan kepemimpinan yang negatif. Kepemimpinan yang baik menggunakan standar akhlak utama dalam memperoleh, menggunakan, dan mempertanggung-jawabkan kekuasaannya. Pemimpin yang baik tidak melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara.

Untuk menggapai kesejahteraan hidup yang merata dalam kehidupan masyarakat tersebut, pemimpin diharuskan memiliki kualifikasi seperti memiliki ilmu yang memadai tentang pemerintahan, pengalaman dalam kepemimpinan,¹³ sehat jasmani dan ruhani, dan visioner. Tidak ada syarat laki-laki seperti yang sering diperbincangkan tersebut.¹⁴ Jika berorientasi pada definisi kepemimpinan tersebut, tidak ada syarat yang dipatok pada jenis kelamin laki-laki, tetapi pada kemampuan untuk berkomunikasi efektif demi kesejahteraan warga negara. Penyebutan syarat laki-laki tersebut karena budaya patriarki yang kuat berimplikasi politik pada keputusan bahwa putra mahkota dan raja harus laki-laki. Untuk kepentingan ini dibutuhkan aturan legalitasnya.¹⁵

Proses menyejahterakan warga harus dilakukan oleh pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, di antaranya dengan memanfaatkan kemampuan jaringan yang luas. Di sisi ini, kemampuan komunikasi dan lobi menjadi amat penting, baik kepada sesama pemimpin juga kepada semua potensi yang bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga, seperti pengusaha untuk penguatan ekonomi, cendekiawan untuk peningkatan dunia pendidikan, ilmu, dan teknologi, militer atau kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan, dan potensi lain yang dibutuhkan oleh bangsa menuju kesejahteraan hidupnya.

Dengan bahasa lain, formula kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kompetensi diri ditunjang dengan agresi-kreatif dan kekuasaan (*power*). Ketiganya, kata Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, bersama Jeans Stoess, ditemukan dalam kepemimpinan perempuan Barbara Gallagher, seorang politikus yang berhasil. Kompetensi dibutuhkan sebagai dasar kemampuan untuk memegang tampuk kepemimpinan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Agresi berarti ada agresivitas dan keberanian untuk bersaing. Meskipun terkadang agresi perempuan ini dipersepsi negatif, tetapi agresi yang bisa diterima¹⁶ adalah kemampuan untuk bekerja, mempunyai sifat inisiatif, berusaha keras, menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, mempunyai ambisi (positif), mempunyai prinsip hidup, membela diri bila diserang, mempunyai pandangan orisinal, dan berani mengemukakannya, mempunyai tujuan hidup, dan mampu membuat rencana berdasarkan tujuan tersebut. Ambisi, meskipun positif dalam konteks sosial, perempuan yang ambisi tidak disukai oleh masyarakat.

Kreativitas bagi calon pemimpin dimaksudkan bahwa seorang yang menjadi pemimpin harus memiliki kecerdasan secara komprehensif (intelektual, emosional, dan spiritual/ IESQ) sehingga mampu memecahkan berbagai masalah (*problem solving*), khususnya yang terkait dengan problem kenegaraan seperti sosial, ekonomi, dan keamanan. Tentang hal ini, pemimpin harus belajar tentang epistemologi pemecahan masalah agar kebijakan yang diambil menyentuh dasar dan inti permasalahan yang dihadapi.¹⁷ Untuk meningkatkan daya kreatif, pendidikan menjadi media utama, termasuk bagi perempuan yang menginginkan jabatan kepemimpinan.¹⁸

Kekuasaan perempuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, *gemah ripah loh jinawe tata tentrem kerta raharja*, cukup sandang-pangan-papan, tenteram, dan



bahagia. Seperti cerita Barbara, ia mengawali karier politiknya sebagai relawan pendidikan, menjadi pelobi pendidikan, dan kemudian menjadi pemimpin sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sistem pendidikan.¹⁹ Pendidikan sebagai media yang memproduksi ilmu, pengetahuan, dan teknologi diyakini sebagai *soft power*, yang memiliki kekuatan besar dan mampu mengalahkan *hard power* manapun. Peningkatan SDM lewat pendidikan menjadi alternatif kuat untuk pemberdayaan perempuan sebagai manusia.²⁰

Pelibatan seluruh komponen untuk tujuan dan kepentingan kesejahteraan bersama ini yang menunjukkan ciri kepemimpinan demokratis; dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk optimalisasi peran ini, sifat-sifat pemimpin yang ideal untuk mengemban tugas kemaslahatan rakyat secara global meliputi;²¹ (1) *personality traits* (sifat-sifat kepribadian), seperti: *strong will* (kemauan keras), *optimism*, *courage* (berani), *fair* (adil), *having high integrity* (memiliki kejujuran yang tinggi), *self-assurance* (ketenangan diri), *individuality* (kepribadian), (2) *abilities* (kemampuan), meliputi; *Intelligence* (kecerdasan), *inisiative*, *perspective* (pandangan), *originality* (keaslian), *understanding* (pengertian), *knowledgeable in general* (memiliki pengetahuan umum), *knowledgeable about particular job* (banyak mengetahui tentang pekerjaan khusus), (3) *social skills* (kemahiran sosial), meliputi; *communicative ability* (kemampuan berkomunikasi),²² *a sense of fair play* (perlakuan yang adil), *human understanding* (manusiawi), *supervisory ability* (kemampuan mengawasi), *being a leader and being a delegator* (sebagai pemimpin dan sebagai delegator), dan lain-lain.

Dengan kualifikasi tersebut diharapkan pemimpin mampu meningkatkan kesejahteraan dan membenamkan kemiskinan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan semakin meningkat dengan kebijakan yang belum jelas dan belum tentu ujung pangkalnya. Pemimpin harus memahami penyebab apa, kemiskinan ini menjadi carut-marut? Apa yang memperkuat penyelesaian problem yang ada?²³ Selain problem kemiskinan, problem lain yang seringkali muncul adalah konflik sosial, maka kemahiran dalam memahami anatomi konflik dan melakukan manajemen konflik harus dipersiapkan bagi pemimpin. Mengelola konflik itu penting agar konflik menjadi memiliki makna bagi kemajuan dan kesejahteraan warganya.²⁴ Konflik dalam perjalanan kemanusiaan sudah ada sejak Nabi Adam, yaitu pertikaian antara Kabil dan Habil (Kain dan Abel), saudara kandung sendiri karena memperebutkan gadis cantik. Menghindari konflik, mustahil bisa dilakukan, yang harus dilakukan adalah mengatur konflik agar konflik berujung pada kebaikan dan kemaslahatan rakyat, tidak menjadi keburukan sebab dibiarkan atau dikelola secara serampangan atau asal-asalan.

Dalam kosmologi Cina kuno, perbedaan bisa disinkronkan dan saling membantu, bukan menimbulkan konflik, dengan simbol *Yin* dan *Yang*. Simbol pertama mewakili bayangan, sisi feminin, dan rembulan, sedangkan yang kedua mewakili cahaya, sisi jantan, dan matahari. Daya *Yin* bersifat pasif dan *Yang* bersifat aktif. *Yin* dan *Yang* saat ini sering digunakan sebagai representasi keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Kedua pihak terkandung dalam satu lingkaran untuk menunjukkan bahwa daya-daya yang bertentangan saling mengandung satu bagian dari yang lain. Keduanya bergantung dan tidak antagonistik.²⁵ *Yin–Yang* menjadi simbol kebersamaan, meski dalam perbedaan saling membutuhkan, melengkapi, dan menggantikan dalam upaya menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.²⁶

D. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mampu mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahannya. Hal ini menjadi ciri kepemimpinan gaya demokratis,²⁷ yang lebih menekankan pada



kebersamaan. Ciri kepemimpinan gaya demokratis yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak dan ia bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, keputusan kebijakan dibuat bersama, antara pimpinan dan bawahan, komunikasi berlangsung timbal-balik, prakarsa bisa dari pimpinan maupun bawahan, pujian dan kritikan seimbang, pimpinan mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing, terdapat suasana saling percaya, menghormati, dan menghargai, serta tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama, pimpinan dan bawahan.

Kekuasaan di dalam negara demokratis dibagi menjadi tiga, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, kekuasaan legislatif yang memproduksi aturan dan hukum, dan kekuasaan yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman atau pengadilan. Negara Indonesia mengikuti azas Trias Politika yang membagi kekuasaan pada tiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tidak menyatu dalam satu kekuasaan tunggal yang absolut, sebagaimana dalam negara monarki absolut. Negara demokrasi yang pada masa Orde Lama disebut demokrasi terpimpin, pada masa Orde Baru disebut demokrasi Pancasila, dan setelah reformasi menuju demokrasi yang sesungguhnya.

Pembagian tugas dari tiga lembaga yang ada dalam pemerintahan juga semakin spesifik. Sebagai contoh, pembagian tugas di wilayah peradilan, selain dilaksanakan oleh penegak hukum yang selama ini telah dikenal seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan advokat atau pengacara, pascareformasi ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan *menggelendeng* para koruptor di negeri ini,²⁸ serta lembaga atau tim lain yang dibutuhkan dengan tugas yang berbeda.

Dengan pendelegasian tugas yang semakin spesifik berarti pertanggungjawaban pemimpin kepada publik juga semakin mudah dan ringan. Setiap lembaga jika berfungsi normal sesuai tupoksinya dapat dipastikan proses pelaksanaan tugas kolektif pemerintahan akan berjalan lancar. Apalagi dengan adanya kecenderungan pembentukan panitia Adhoc, dan tim akan mempermudah tugas yang variatif dan berat tersebut. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut akan semakin ringan lagi jika dilihat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

E. FUNGSI ICT DALAM POLITIK PEREMPUAN

Sebagaimana telah disebutkan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, *Information and Communication Technology* (ICT) mampu mendekatkan belahan dunia yang berjauhan dengan cepat dan mudah. ICT membuat berita yang terjadi di benua Amerika bisa disaksikan di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Setiap hari orang bisa menyaksikan *Break News* di stasiun TV yang menampilkan berbagai berita di belahan bumi, pada saat itu juga. Siaran langsung sepak bola dunia menjadi bukti paling mudah ditangkapnya sinyal oleh pemirsa TV, sampai di pelosok desa. Komunikasi yang menampilkan suara dan gambar, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang menjadi kebiasaan harian masyarakat Indonesia adalah sms lewat handphone antarkawan dan *chatting* lewat internet.

Kemajuan ini secara politis bisa didesain oleh pemilik sumber informasi dan yang menguasai ICT untuk mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan memprovokasi orang lain untuk kepentingan politiknya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kepemimpinan berfungsi untuk melakukan penggalangan massa dengan pembentukan opini, dan untuk mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan orang lain agar berkenan melakukan sesuatu sesuai dengan target yang diharapkan oleh pimpinan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi dewa dan nabi, yang mampu mengubah dunia seperti permainan sulap yang bisa mengubah sesuatu dalam hitungan detik. Massa atau publik



dapat dibentuk atau dipengaruhi sesuai dengan keinginan pemilik modal dan penguasa. Penerapan teknologi tersebut telah menciptakan manusia-mesin (*l'homme machine*) dalam masyarakat modern. Melalui perjalanan yang panjang, ICT membentuk perilaku manusia seperti mesin, yang hidupnya hanya didasarkan pada *stimulus* (S) dan *response* (R), sebagaimana yang digambarkan dalam psikologi Behaviorism. Pribadi yang asalnya bebas, utuh, dan rasional bisa tenggelam dalam satuan yang disebut masyarakat massa. Massa menjadi satu-satunya entitas yang harus diperhitungkan. Manusia-mesin serta manusia dan masyarakat massa itu menghasilkan budaya massa. Budaya massa itu adalah produk dari mayoritas yang “tidak berbudaya”, berbeda dengan budaya adiluhung yang dihasilkan oleh elit.²⁹ Elit dalam masyarakat seperti cendekiawan, budayawan, dan ulama akan menciptakan budaya adiluhung tersebut, meskipun akan terpinggirkan oleh budaya massa. Budaya massa ini diekspresikan dalam bentuk kesenian, buku-buku, elektronika, barang konsumsi, dan alat kebijaksanaan populer seperti bahasa gaul. Budaya massa telah menjadi komoditas, suatu *commodity fetishism*, yang lebih menekankan selera kebutuhan konsumen. Budaya hedonisme, pemuja kenikmatan akan semakin memanfaatkan ICT ini sesuai dengan selera mereka.

Kecenderungan penganut hedonis, lewat budaya massa memola dengan sangat jenius perilaku manusia. Terkait dengan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini, pendidikan seks diperlukan dan diberikan sejak dini karena terkait dengan libido seksual manusia itu sendiri yang dieksploitasi dengan transparan dan bebas. Meskipun tendensi anak-anak untuk bermain-main terhadap alat kelaminnya tidak manifestasi seksual yang terlalu dini, tetapi sebagai “kesenangan fisik mendasar” yang sangat mengatur kehidupan kanak-kanak seperti lewat isapan, buang air, stimulasi kulit, masturbasi, dan kesenangan untuk telanjang.³⁰ Hal ini jangan sampai “salah urus”, dan berkembang negatif untuk itu harus dikawal dan dibimbing oleh orangtua secara bijak agar tidak termakan oleh kemajuan ICT lewat TV atau bacaan porno yang merusak anak-anak dan generasi muda.

Perhatian untuk menjaga agar kemajuan teknologi ramah sosial dan spiritual, harus ditingkatkan karena setiap individu, sejak membuka mata di pagi hari sampai memejamkan mata kembali di malam hari, tidak bisa lepas dari komunikasi.³¹ Lewat komunikasi, setiap orang akan terpola. Upaya memperkuat posisi membutuhkan komunikasi ini.

Kekuatan politik bisa memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk mengangkat reputasi seseorang dan juga bisa menjatuhkan orang yang lain untuk kepentingan kekuasaan. Perselingkuhan Bill Clinton, Video mesum anggota DPR RI, dan poligami da'i kondang dimuat di media secara sepektakuler menunjukkan bagaimana media yang memanfaatkan kecanggihan teknologi mampu berbuat dan berpengaruh lebih banyak dari yang disangka publik.

Yang menarik adalah kecanggihan ICT dirasa lebih sedap jika memerankan perempuan dan kasus di seputar perempuan sebagai bumbunya. Batang rokok yang diselipkan di bibir merah seorang perempuan di layar kaca akan lebih menarik pemirsa iklan rokok tersebut. Perempuan, kekuasaan, dan ekonomi yang terkait erat memperkuat asumsi bahwa perempuan (*wanita*) adalah penggoda laki-laki di samping kekuasaan (*tahta*, jabatan), dan *harta* (kekayaan ekonomi). Mengemas perempuan di multimedia untuk kepentingan politik dirasa cukup efektif.

Perempuan yang secara sosial dimasukkan dalam kategorikan penggoda dan komoditi, mempersulit proses negosiasi jabatan politik yang telah diganjil lebih dulu oleh dasar teologis tentang keharaman pemimpin perempuan oleh sebageian tokoh agama. Apalagi jika konstruksi dan labelisasi diskriminasi



terhadap perempuan ini dikemas lewat media cetak dan elektronik maka kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan politik semakin berat untuk direalisasikan atau dibuktikan.

Pemimpin politik harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelengkap terhadap kekuatan kompetensi, agresi-kreatif, dan kekuasaan yang telah dimiliki. Dengan kekuatan teknologi beserta kekuatan sifat-sifat potensi diri yang positif, kemampuan diri, dan keahlian sosial, sebagaimana yang telah disebutkan, perempuan akan mampu bersaing ketat dengan laki-laki karena berkualitas. Suatu hal harus diingat menurut Arnold Pacey³² bahwa kehadiran teknologi agar bisa efektif implementasinya di masyarakat harus didukung oleh tiga elemen yaitu aspek teknis, organisasi, dan budaya. Secara teknis harus terpenuhi kelengkapan perangkat teknologi yang digunakan. Secara organisatoris harus ada *policy* yang mengatur pemanfaatan teknologi pada masyarakat, sementara budaya adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemanfaatan ICT.

Terkait dengan budaya ini, masyarakat Indonesia akan semakin mendekat pada budaya ITC ini dan akan memanfaatkannya secara efektif. Pemimpin politik bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hal ini dapat diketahui lewat kedudukan media massa yang semakin dominan dalam pembentukan opini publik (*public opinion*) dan terakumulasinya kepemilikan media massa yang sudah tentu memanfaatkan teknologi, oleh beberapa kelompok pengusaha dan penguasa.³³ Pemilik modal media massa tersebut dapat dipastikan memiliki agenda yang terkait oleh bisnis, politik, atau ideologi. Pertarungan media massa ini akan semakin kuat pada era yang akan datang karena ada pandangan umum yang berkembang di kalangan para kandidat (jabatan politik) bahwa “penguasaan” dan media massa (cetak dan elektronik) merupakan salah satu jaminan akan kelancaran menuju kekuasaan. Untuk kekuasaan, mereka akan melakukan eksploitasi total atas sumber-sumber dan akses pembentukan opini publik.

Tradisi baru yang menggunakan kekuatan ICT akan menggantikan tradisi lama, dan budaya patriarkhi akan diganti oleh budaya baru yang egaliter dan demokratis. Kekuasaan akan mudah diraih oleh siapa saja tanpa mengenal jenis kelamin yang memiliki kualitas memadai dan daya saing tinggi. Jika sudah demikian, dalam konteks hukum Islam kemungkinan adanya ijtihad baru tentang kepemimpinan perempuan yang sah, tidak tergugat menjadi niscaya. Ijtihad baru dengan prinsip evolusioner seperti yang digagas oleh Mahmoud Muhammad Toha akan mudah dipahami. Sebagai contoh, jaman dahulu perempuan bisa diwarisi, kemudian pada jaman Nabi, perempuan bisa mendapatkan warisan satu banding dua, saat ini perempuan telah diperlakukan sama oleh orangtuanya dan mendapatkan harta waris yang sama dengan saudaranya yang laki-laki. Ia juga memperoleh kesempatan yang sama pada wilayah publik seperti dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.³⁴

Teknologi membuat segala impian menjadi kenyataan. Siapa pun tidak bisa membatasi gerak langkah kreatif seseorang. Pembatasan kreativitas hanya akan membebani diri dan memasung kemanusiaan. Biarkan dunia berbicara dengan bahasa dan caranya selama untuk kemasalahatan bersama. Teknologi merupakan karunia Tuhan yang membebaskan, selama dalam kerangka positif ia dikembangkan dan dimanfaatkan oleh siapa pun, di mana, dan kapan pun juga.

F. PENUTUP

Kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mampu mempermudah tugas dan kewajiban pemimpin. Lewat ICT ini pemimpin bisa melakukan komando, pembagian tugas, memotivasi, menggerakkan, dan memberi hukuman dalam waktu yang cepat dan mudah. Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin mampu melakukan secara massal apa yang ia harapkan agar mendapatkan respon



dari rakyat atau bawahannya. Oleh karena itu, ICT dapat diciptakan sebagai media massa yang mampu mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat yang dipimpinya.

Bantuan ITC membuat segalanya jadi mudah, cepat, dan berkualitas. Di negara monarki absolut yang kekuasaannya terpusat saja dimungkinkan akan mudah melaksanakan tugas kepemimpinan, apalagi dalam negara demokrasi yang ada pembagian tugas dan kewenangannya sampai pada wilayah yang sangat spesifik. Pembagian tugas ini berimplikasi pada pembagian wewenang dan pertanggungjawaban. Akurasi data dan peristiwa terkait dengan pelaksanaan tugas, meskipun telah terbagi-bagi tetap mudah untuk dikumpulkan dan direplay dengan bantuan ICT, dan dapat ditampilkan ulang sehingga akurasi data benar-benar mudah dicapai dan disaksikan bersama.

Pelaksanaan tugas yang serba mudah, akan berimplikasi pula pada perubahan hasil ijihad tentang persyaratan pemimpin yang harus laki-laki dengan pertimbangan kekuatan fisiknya, dan pengetahuan yang lebih luas karena diperkenankan belajar ke luar rumah, sementara anak perempuan *dipingit* dan diyakini memiliki kelemahan fisik sehingga ia tidak mampu menjadi pemimpin perang. Syarat ini menjadi gugur karena *illat* yang mendasari telah berubah.

Dengan kecanggihan teknologi, semuanya dapat dilakukan oleh siapa saja yang menguasainya, baik dalam menjalankan tugas kepemimpinan untuk kesejahteraan rakyat maupun di saat ada peperangan yang bisa dilakukan hanya dengan menekan tombol alat kontrol persenjataan, yang semuanya serba digital dan akan berjalan sesuai programnya. Komputerisasi dan digitalisasi sebagai hasil dari kemajuan teknologi ini menempatkan perempuan semakin sejajar dengan laki-laki, selama kemampuan dalam bidang keilmuan dan teknologinya juga setara. Kendala fisik tidak lagi bisa dipersoalkan oleh siapapun yang mengerti tentang teknologi. Tinggal bersaing pada kualitas, siapa di antara laki-laki dan perempuan yang akan sukses dan akan memimpin dunia?

ENDNOTE

¹ Penjelasan lebih luas dalam <http://maswig.blogspot.com> dengan judul *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Aktivitas Parta Politik*, hal. 1.

² Survey yang dilakukan oleh George Washington University, menunjukkan bahwa elektronik mail (e-mail) telah menjadi sarana komunikasi politik yang cukup ampuh dan populer di Amerika selama putaran pemilu 2002 untuk memilih senator. Selanjutnya baca *ibid*, hal. 2.

³ Kejayaan yang diraih oleh Ratu Bilqis membuat Nabi Sulaiman cemburu dan melakukan negosiasi untuk mempersatukan kedua kerajaan. Sulaiman berhasil dan al-Qur'an mengabadikan Ratu Bilqis sebagai contoh pemimpin perempuan yang mampu membuat kerajaannya makmur dan maju. Informasi tentang perbincangan perempuan menjadi pemimpin ini bisa dilacak dalam Siti Musdah Mulia, *Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis*, <http://islamlib.com/id>.

⁴ Uraian amat mendalam tentang liku-liku dilematis tersebut dalam fakta dan mitologi kemanusiaan bisa ditemukan dalam Simone de Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, Terj. Toni B. Febriantono (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003).



Perjalanan sejarah yang panjang dan berliku-liku dari sejarah awal kemanusiaan sampai jaman pasca revolusi Perancis dan modern.

⁵ Ada sepuluh materi baru yang dihimpun *Kompas*, Rabu 5 Maret 2008, hal. 4, yaitu jumlah dan alokasi kursi DPR, pemilih, pemungutan suara, cara memberikan suara, keterwakilan perempuan, ambang batas, perhitungan dan rekapitulasi suara, penentuan calon terpilih, partisipasi masyarakat, terakhir pelanggaran dan perselisihan hasil.

⁶ Argumen tersebut sudah banyak diperbincangkan dalam perspektif agama seperti kajian Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), dan referensi lain. Dalam tulisan ini penulis tidak membahas dalam perspektif ini.

⁷ Tim Siyasa atau Politik Warga NU Kabupaten Banyumas ini dibentuk pada 14 Nopember 2006, penulis sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk untuk menjangkau aspirasi warga NU, membuat kriteria ideal, dan membuat laporan ke PCNU Banyumas. Tim Siyasa bukan tim pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. Tim berakhir pada 19 Nopember 2007 setelah melaksanakan ketiga tugas di atas dan sudah ada kejelasan empat pasangan calon yang kesemuanya *background*-nya adalah *nahdliyyin*. Selanjutnya, baca Laporan Tim Siyasa Warga NU Banyumas tahun 2007.

⁸ Pada pemilu tahun 1999 sebagian besar ulama NU dan tokoh PKB mendukung pencalonan presiden perempuan. Mereka tidak mempermasalahkan gender untuk jabatan presiden. Sebaliknya dengan berbagai alasan, kelompok modernis tidak menyetujui pencalonan presiden perempuan. Para tokoh dari beberapa partai Islam dengan alasan *Syari'at* berusaha menjegal kemunculan presiden perempuan di Indonesia. Penolakan terhadap media dikemas sedemikian rupa oleh media sebagai orang yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik untuk itu poros tengah mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat kepemimpinan Gus Dur tidak mampu mendukung kepentingan "Poros Tengah", kelompok ini pula yang menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dan lupa terhadap fatwa "haram" presiden perempuan yang dulu pernah dikemukakan. Data media terkait dengan hal ini dapat dibaca Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

⁹ Pada pertemuan 50 kiai Banyumas pada 2 September 2007 reaksi penolakan tersebut muncul meski kemudian dapat menerima karena hal tersebut sudah ada keputusannya dalam Munas Alim Ulama.

¹⁰ Hasil perhitungan suara berdasarkan sumber KPU Banyumas, pasangan Marjoko - Ahmad Husein yang diusung oleh PKB mendapat 321.106 suara (36,34%), pasangan Singgih Wiranto-Laily Sofiyah Mansyur yang diusung oleh Partai Golkar dan PAN mendapat 210.719 suara (23,85%), pasangan Bambang Priyono - Tossy Aryanto yang diusung oleh PPP, Partai Demokrat, dan PKS,



mendapat 255.185 suara (28,85%), sedangkan pasangan Aris Wahyudi - Asroru Maulana yang diusung oleh PDIP mendapat 96.493 suara (10,92%). Jumlah suara sah 883.503. Jumlah suara tidak sah 25.559. Total suara 909.62. Pemenang pemilu adalah pasangan Marjoko-Ahmad Husein dari PKB. *Kompas*, Selasa 19 Pebruari 2008.

¹¹ Ada 40 definisi tentang kepemimpinan yang dikutip oleh Sutarto dalam *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 12-23. Dalam konteks Islam ada definisi dan pembahasan lain tentang kepemimpinan seperti dalam Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis)* dengan Kata Pengantar Mahfud MD (Yogyakarta: AL-Muhsin Press, 2002).

¹² Sebagaimana kaidah ushul fiqh, *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, tugas pemimpin terhadap rakyatnya adalah menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (masalahah) hidup mereka. Penjelasan lebih jauh dalam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'* (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hal. 83-84.

¹³ Pengalaman kepemimpinan diraih secara gradual dari tingkat bawah ke atas. Jika seseorang dinominasikan jadi presiden maka ia harus memiliki pengalaman kepemimpinan nasional dengan mobilitas internasional. Tidak ideal jika pemimpin nasional "datang tiba-tiba" tanpa melalui jalur kaderisasi yang alami, yaitu melalui tahapan-tahapan edukatif yang rasional.

¹⁴ Pendapat ulama tentang syarat laki-laki ini bisa dilacak dalam Imam al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, TT) saat membicarakan tentang syarat-syarat pemimpin.

¹⁵ Pada awal abad ke-20, sejumlah negara Islam telah menggeliat menggugat otoritas patriarkhis ini. Peminggiran perempuan di ruang publik dan politik disadari telah merugikan semua orang. Perubahan status hukum perempuan ini dimulai dari Kesultanan Turki Usmaniyah (1917) diikuti oleh negara Islam lain seperti Syuriah (1953 dan 1975) dan Indonesia. Lebih lengkap baca Husein Muhammad, *Partisipasi Politik Perempuan dalam* <http://islamlib.com/id>.

¹⁶ Dikutip dari pendapat Karen Horney oleh Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, bersama Jeans Stoess dalam *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 34.

¹⁷ Sebagai pegangan awal bisa dipelajari misalnya Alfonso Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper* (Jakarta: Gramedia, 1989).

¹⁸ Tentang sisi penting pendidikan bagi perempuan secara umum baca buku Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: STAIN Press & Gama Media, 2003).

¹⁹ Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess dalam *Women in Power*, hal. 36.



²⁰ Terkait dengan ini di antaranya baca Michel Foucault, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*, Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002).

²¹ Ada lima belas buku yang mengemukakan sifat-sifat kepemimpinan ini, lebih lengkap baca, Sutarto, *Dasar-dasar*, hal. 38-51.

²² Sebagai gambaran tentang sisi strategis komunikasi dengan menggunakan bahasa yang efektif-politis dan relasinya dengan kekuasaan baca Ariel Haryanto, dkk., *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996).

²³ Kasus kemiskinan di negara-negara berkembang atau dunia ketiga masih sangat rumit dan perlu penanganan serius karena ada dosa-dosa perencanaan pembangunan. Untuk hal ini uraian Mahbu ul Haq dalam *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Terj. Masri Maris, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983).

²⁴ Mempelajari buku-buku tentang manajemen konflik dan berorganisasi merupakan langkah menuju pemimpin profesional. Tentang mengelola konflik ini baca di antaranya Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, terj. Bern. Hidayat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

²⁵ Saling membutuhkan tersebut berarti antara keduanya bisa saling melengkapi dan pada wilayah publik seperti kepemimpinan atau politik, bisa saling menggantikan sesuai dengan kompetensi dan kesempatannya masing-masing. Tentang simbol Yin dan Yang tergambar dalam Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict*, hal. 19.

²⁶ Dengan pertimbangan pada pemaknaan filosofis tersebut simbol tersebut, Penulis sebagai sebagai pembantu Ketua bidang akademik dan mantan Ketua PSG senang dan setuju terhadap nama Jurnal Yin Yang yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.

²⁷ Hoda Lacey, *How to Resolve Conflict*, hal. 75-77. Kepemimpinan demokratis ini berbeda dengan kepemimpinan otoriter yang memiliki wewenang, keputusan, kebijakan, prakarsa, dan tanggung jawab yang terpusat dan dipikul pimpinan. Berbeda lagi dengan kepemimpinan liberal yang menyerahkan berbagai kegiatan kepada bawahan. Wewenang, keputusan, kebijaksanaan, dan prakarsa diserahkan pada bawahan. Pimpinan berkomunikasi hanya jika diperlukan oleh bawahan. Tanggungjawab organisasi dipikul oleh orang per orang.

²⁸ Kasus korupsi di Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), misalnya, yang melibatkan orang-orang kelas berat dengan tersangka antara lain Arthalita Suryani yang memberi suap 660.000 dollar Amerika Serikat kepada Jaksa Urip Tri Gunawan bisa ditangkap tangan oleh KPK. *Kompas*, Sabtu 8 Maret 2008, hal. 1. Pembagian tugas yang semakin spesifik berarti tugas pemimpin semakin ringan dengan catatan dilaksanakan dengan baik dan kompak.



²⁹ Kuntowijoyo, *Maklumat Satra Profetik* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), hal. 9-12.

³⁰ Kenneth Wolker, *The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi*, Terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid (Yogyakarta: Diva Press, 2005), hal. 150-151.

³¹ Tentang nilai strategis komunikasi dalam kehidupan, baca Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1994).

³² Ahmad Syafrudin Syahri, *Teknologi Informasi sebagai Agen Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan* dalam <http://plasmedia.com/articles/asp>, hal. 1.

³³ Tentang kecenderungan ini baca, *Kepentingan Berita: Sebuah Telaah* dalam <http://xananang.multiply.com/journal/item/1/>, hal. 1.

³⁴ Prinsip Evolusioner ini jika diterapkan akan berpengaruh pada, diskriminasi perempuan seperti penghapusan terhadap poligami, perkawinan, dan penghapusan terhadap diskriminasi non-muslim dalam perkawinan dalam arti seorang Muslim atau Muslimah diperbolehkan menikah dengan nonmuslim karena kekhawatiran sosio-teologis yang ada pada masa lalu saat ini sudah tidak ada dan tidak aktual lagi. Tentang pemikirannya ini baca Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 335-346.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi, Imam. TT. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman. 1965. *al-Aybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*. Surabaya: al-Hidayah.
- an-Naim, Abdullah Ahmad. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS.
- Anonim. TT. "Kepentingan Berita: Sebuah Telaah", dalam <http://xananang.multiply.com/journal/item/1/>
- Anonim. TT. "Pemanfaatan Tenologi Informasi dalam Mendukung Aktivitas Parta Politik", dalam <http://maswig.blogspot.com>.
- Beauvoir, Simone De. 2003. *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Terj. Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Promethea.
- Cantor, Dorothy W. dkk. 1998. *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya.



- Haryanto, Ariel, dkk. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Kompas, Selasa 19 Februari 2008.
- Kompas, Rabu 5 Maret 2008.
- Kompas, Sabtu 8 Maret 2008.
- Kuntowijoyo. 2006. *Maklumat Satra Profetik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Lacey, Hoda. 2003. *How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja*. Terj. Berni Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahbu ul Haq. 1983. *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*. Terj. Masri Maris. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, Husein. TT. "Partisipasi Politik Perempuan", dalam <http://islamlib.com/id>.
- Mulia, Siti Musdah. TT. "Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis", dalam <http://islamlib.com/id>.
- Rakhmat, Jalaludin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Roqib, Moh. 2003. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Press & Gama Media.
- _____. 2007. *Laporan Tim Siyasa atau Politik Warga NU*. Banyumas: PCNU.
- Sutarto. 1989. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syahri, Ahmad Syafrudin. TT. "Teknologi Informasi sebagai Agen Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan", dalam <http://plazmedia.com/articles/asp>.
- Taryadi, Alfonso. 1989. *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper*. Jakarta: Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wolker, Kenneth. 2005. *The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi*. Terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid. Yogyakarta: Diva Press.
- Zainuddin, Muhadi dan Abdul Mustaqim. 2002. *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis)*. Yogyakarta: Al-Muhsin Press.
- Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik: Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.